

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah menyelesaikan penyusunan/perencanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020, yang merupakan bentuk perencanaan program dan kegiatan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Demikian Renja Kerja tahun 2020 ini kami susun semoga dapat menjadikan acuan dan sebagai peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Temanggung, Juni 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611110 198503 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2019	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Capaian Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	21
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung	30
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung	58
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	59
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	68
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	68
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran	73
3.3. Program dan Kegiatan	75
BAB IV PENUTUP	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	2
------------	--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Cakupan Penegakan Perda dan Perbup Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018	24
Tabel 2.3	Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup Tahun 2018	25
Tabel 2.4	Tabel Rasio Petugas Satpol PP Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018	26
Tabel 2.5	Tabel Data pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2018	27
Tabel 2.6	Tabel Rasio Linmas per RT Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018	31
Tabel 2.7	Tabel sebaran anggota Linmas per kecamatan se-Kabupaten Temanggung Tahun 2018	31
Tabel 2.8	Tabel Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018	35
Tabel 2.9	Tabel Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018	36
Tabel 2.10	Tabel Data Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018	37
Tabel 2.11	Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018	39
Tabel 2.12	Tabel Data Pelanggaran Perda K4 per kecamatan	40
Tabel 2.13	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018	41
Tabel 2.14	Tabel Jumlah Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2018	42
Tabel 2.15	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018	45
Tabel 2.16	Daftar Personil Seksi Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018	46
Tabel 2.17	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter Pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018	48
Tabel 2.18	Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Tahun 2018	49
Tabel 2.19	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Tahun 2018	50
Tabel 2.20	Tabel daftar penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Pemadam Kebakaran	52
Tabel 2.21	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung	55
Tabel 2.22	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020	60
Tabel 2.23	Usulan-Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	67

Tabel 3.1	Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung	74
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2020	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

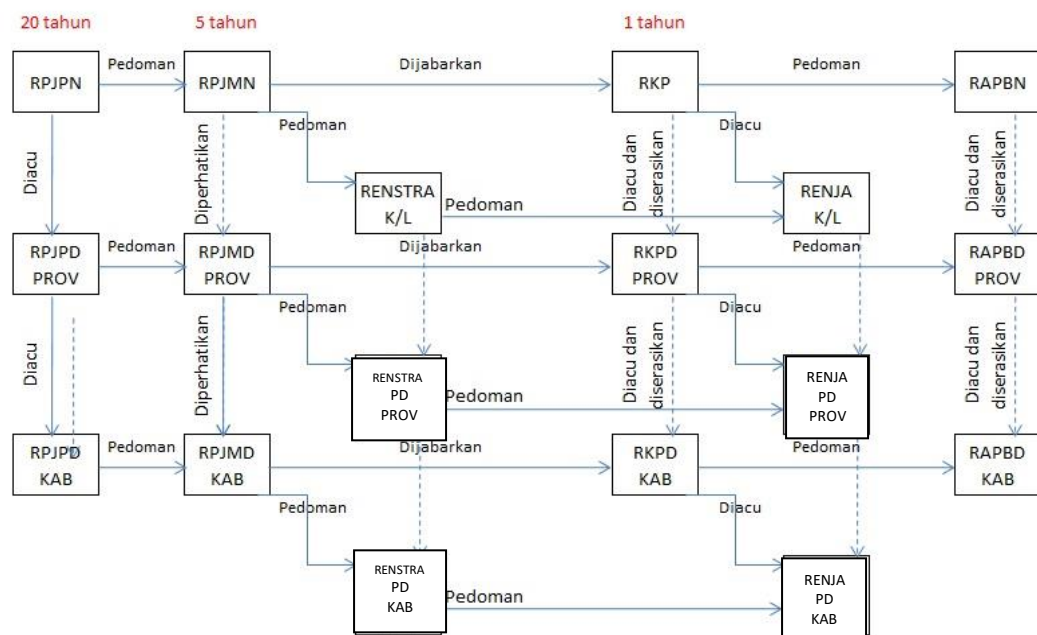
RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Renja Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2020 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung

dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2020.

Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2020 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2020 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung tahun 2020, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP, yang menyangkut aspek:

- 1) Data Pokok Perencanaan Satpol PP dan Damkar;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2018;
- 3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Satpol PP dan Damkar;

- 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung;
- 5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020;
- 6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- 7) Informasi lainterkait pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung tahun 2018;

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung;

Review hasil evaluasi pencapaiantarget program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kineja daerahdisertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan

e. Review terhadap rancangan awal RKPD;

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan

Awal Renja PD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung tahun 2020.

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Satpol PP

dan Damkar Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Dokumen rancangan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dengan dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung. disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2020;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan Capaian Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018.

Evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung s.d. Triwulan IV tahun 2018 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung berupa :

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
& Capaian Renstra s.d Tahun 2018

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
A	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
1	Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				1,870,992,000		802,438,250		425,000,000	760,143,000		647,381,565		85.17		1,449,819,815		77.49	
a	Peningkatan kerjasama dengan aparatur keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terlaksananya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	rakor	5	80,000,000	4	50,946,500	1	20,000,000	0	0	0	0	0	4	50,946,500	80.00	63.68	
b	Koordinasi Keamanan Daerah	Terlaksananya patroli terpadu koordinasi keamanan daerah	kecamatan	60	177,300,000	35	68,847,500	7	45,000,000	20,000,000	7	18,424,600	100.00	92.12	42	87,272,100	70.00	49.22	
c	Penertiban Pedagang Kaki Lima	Terselenggaranya a penertiban pedagang kaki lima	kecamatan	31	378,820,000	23	164,062,250	7	50,000,000	30,000,000	7	28,035,000	100	93.45	30	192,097,250	96.77	50.71	

d	Penegakan Perda Yustisi	Terlaksananya Penegakan Perda dan Yustisi	%	345	393,050,000	349	193,996,000	70	60,000,000	40,000,000	70	39,825,000	100.00	99.56	419	233,821,000	100	59.49
e	Penertiban Pelajar	Terlaksananya penertiban pelajar	kecamatan	29	152,500,000	25	58,178,000	6	30,000,000	14,500,000	6	14,070,000	100.00	97.03	31	72,248,000	100	47.38
f	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentramana Masyarakat	Terlaksananya patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali tiap kecamatan	6	190,000,000	4	118,882,000	3	70,000,000	478,745,000	3	373,739,165	100.00	78.07	7	492,621,165	100	100
g	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	orang	205	125,000,000	205	84,904,500	100	150,000,000	0	0	0	0	0	205	84,904,500	100	67.92
h	Pengadaan bantuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya pengadaan Banpol P	orang	30	176,898,000			30		176,898,000	30	173,287,800	100	97.96	30	173,287,800	100	97.96
i	Penertiban pertambangan mineral dan batubara	Terlaksananya penertiban pertambangan mineral dan batubara	kecamatan	23	162,500,000	4	29,155,000	0	0	0	0	0	0	0	4	29,155,000	17.39	17.94
j	Pembersihan spanduk dan reklame	Terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat	lokasi	6	34,924,000	6	33,466,500	0	0	0	0	0	0	0	6	33,466,500	100	95.83
2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				850,000,000		653,833,500		80,000,000	50,000,000		49,533,000		99.07		703,366,500		82.75

a	Pengadaan Alat Korps Musik	Tersedianya peralatan Korps Musik sesuai standar	paket	1	200,000,000	1	193,061,000	0	0	0	0	0	0	0	1	193,061,000	100	96.53
b	Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pelaksanaan upacara kenegaraan yang khidmat	Pentas	35	450,000,000	24	360,354,000	7	80,000,000	50,000,000	7	49,533,000	100.00	99.07	31	409,887,000	88.57	91.09
c	Pengadaan Pakaian Dinas Korps Musik Praja Sangkakala	Tersedianya pakaian korsik	stel	54	200,000,000	54	100,418,500	0	0	0	0	0	0	0	54	100,418,500	100	50.21
3	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan				3,008,597,000		1,142,936,950		1,290,000,000	797,000,000		793,193,000		99.52		1,936,129,950		64.35
a	Pembinaan Satuan Linmas	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten	orang/RT	5	640,310,000	4	401,125,350	1	130,000,000	70,000,000	1.00	67,132,000	100.00	95.90	5.00	468,257,350	100.00	73.13
b	Diklat SAR Anggota Linmas	Terselenggaranya a Diklat SAR anggota Linmas	orang	800	340,000,000	385	160,120,000	200	80,000,000	0	0	0	0	0	385	160,120,000	48.13	47.09
c	PAM PILKADA	Terlaksananya pengamanan Pemilu kepala daerah	kecamatan	20	1,000,000,000		0	20	1,000,000,000	727,000,000	20	726,061,000	100	99.87	20	726,061,000	100	72.61

d	Pengadaan Pakaian Linmas Desa/Kelurahan	Tercukupinya pakaian Linmas desa/kelurahan	stel	550	798,287,000	471	360,896,600	0	0	0	0	0	0	0	471	360,896,600	85.64	45.21
e	Penyelenggaraan keamanan Pilkades	Terlaksananya pengamanan pemilu kepala desa	Desa	35	150,000,000	35	148,588,000	0	0	0	0	0	0	0	35	148,588,000	100	99.06
f	Pembinaan dan Pelantikan Anggota Satuan Linmas se Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pembinaan dan pelantikan anggota Satlinmas se-Kabupaten Temanggung	orang	715	80,000,000	715	72,207,000	100	80,000,000	0	0	0	0	0	715	72,207,000	100	90.26
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				613,620,000		271,179,843		180,000,000	50,000,000		49,110,000		98.22		320,289,843		52.20
a	Pembinaan dan Pengembangan Satpol PP	Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP	orang	226	308,620,000	213	122,175,450	45	60,000,000	50,000,000	45	49,110,000	100.00	98.22	258	171,285,450	100	55.50
b	Pendidikan dan pelatihan Satpol PP	Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP	orang	5	225,000,000	0	70,033,200	1	40,000,000	0	0	0	0	0	0	70,033,200	0	31.13
c	Fasilitasi Kegiatan Peningkatan SDM Satpol PP	Terlaksananya HUT Satpol PP dan Jambore Satpol PP	Orang	50	48,000,000	40	47,340,500	50	50,000,000	0	0	0	0	0	40	47,340,500	80.00	98.63
d	Penguatan Kelembagaan Satpol PP	Terlaksananya penguatan kelembagaan Satpol PP	Kegiatan	4	32,000,000	2	31,630,693	4	30,000,000	0	0	0	0	0	2	31,630,693	50.00	98.85

5	Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				2,494,573,209		1,094,573,209		1,400,000,000	1,099,500,000	12			97.04		2,161,540,816		86.65	
a	Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana bahaya kebakaran	Bulan	24	724,535,035	12	249,535,035	12	475,000,000	199,500,000	12	196,382,157	100.00	98.44	24	445,917,192	100.00	61.55	
b	Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat, mewujudkan masyarakat yang tanggap bahaya kebakaran	Bulan	24	1,770,038,174	12	845,038,174	12	925,000,000	900,000,000	12	870,585,450	100.00	96.73	24	1,715,623,624	100.00	96.93	
B	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN																		
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				110,436,500		109,613,500		5,000,000	3,268,000		3,046,000		93.21		112,659,500		100	
a	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi	dokumen	126	4,500,000	101	3,677,000	25	5,000,000	3,268,000	25	3,046,000	100.00	93.21	126	6,723,000	100.00	100	

b.	Penyusunan DED kantor Satpol PP		paket	1	105,936,500	1	105,936,500	0	0	0				1	105,936,500	100	100	
C	PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,394,253,000		966,814,712		515,000,000	432,355,000		420,754,510		97.32		1,387,569,222		99.52
a	Penyediaan jasa telekomunikasi	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	26,500,000	48	52,619,604	12	80,000,000	49,998,000	12	45,146,906	100.00	90.30	60	97,766,510	100.00	100.00
b	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dinas	bulan	60	510,000,000	48	331,671,838	12	100,000,000	100,000,000	12	99,273,192	100.00	99.27	60	430,945,030	100.00	84.50
c	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	bulan	60	14,184,000	48	8,058,000	12	10,000,000	61,928,000	12	48,400,284	100.00	78.16	60	56,458,284	100.00	100.00
d	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK yang lengkap dan memadai	bulan	60	47,500,000	48	30,200,862	12	10,000,000	5,000,000	12	4,913,500	100.00	98.27	60	35,114,362	100.00	73.92
e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	38,000,000	48	24,599,250	12	10,000,000	5,000,000	12	4,530,000	100.00	90.60	60	29,129,250	100.00	76.66

f	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat listrik yang memadai	bulan	60	12,250,000	48	7,744,000	12	20,000,000	10,000,000	12	10,000,000	100.00	100.00	60	17,744,000	100.00	100.00
g	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	bulan	60	16,800,000	48	7,125,000	12	5,000,000	3,000,000	12	3,000,000	100.00	100.00	60	10,125,000	100.00	60.27
h	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor	bulan	60	160,499,000	48	92,760,000	12	70,000,000	45,000,000	12	48,151,000	100.00	107.00	60	140,911,000	100.00	87.80
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintah	bulan	60	315,000,000	48	230,028,200	12	100,000,000	60,000,000	12	69,993,486	100.00	116.66	60	300,021,686	100.00	95.24
j	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintah	bulan	60	26,000,000	48	16,915,000	12	10,000,000	5,000,000	12	4,830,000	100.00	96.60	60	21,745,000	100.00	83.63
k	Jasa Pelayanan perkantoran	terbayarnya honor tenaga kontrak/honorar daerah	bulan	60	227,520,000	48	165,092,958	12	100,000,000	87,429,000	12	82,516,142	100.00	94.38	60	247,609,100	100.00	108.83
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				1,137,970,000		519,151,300		907,500,000	157,000,000		155,055,000		98.76		674,206,300		59.25

a	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	jenis barang	23	191,500,000	35	254,808,000	5	100,000,000	25,000,000	4	24,980,000	80.00	99.92	39	279,788,000	100	100
b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	unit gedung	5	127,470,000	4	113,321,000	1	150,000,000	35,000,000	1	34,999,000	100	100.00	5	148,320,000	100	100
c	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	60	40,100,000	48	19,765,500	12	25,000,000	7,000,000	12	7,000,000	100.00	100.00	60	26,765,500	100.00	66.75
d	Pembanguna Garasi	Terbangunnya garasi	Unit	1	77,000,000	1	74,610,000	1	0	0	0	0	0	0	1	74,610,000	100	96.90
e	Pengadaan Peralatan Pemadam kebakaran	Tercukupinya peralatan pemadam kebakaran di tiap-tiap pos	Jenis alat	4	200,000,000	0	0	4	200,000,000	50,000,000	4	48,859,000	100	98	4	48,859,000	100.00	24.43
f	Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran dan Ground Tank	Terbangunnya pos pemadam kebakaran wilayah Parakan dan terbangunnya ground tank di wilayah Kec. Temanggung, Tretep, dan Wonobojo	Pos	2	432,500,000			1	432,500,000	40,000,000	1	39,217,000	100	98	1	39,217,000	50.00	9.07
g	Pengadaan peralatan Pengamanan dan Pengawasan	Tersedianya peralatan pengamanan dan pengawasan	paket	20	10,000,000	20	7,300,000		0	0					20	7,300,000	100	73.00
h	Pengadaan peralatan/kelengkapan Jambore Satpol PP	Tersedianya peralatan jambore Satpol PP	paket	1	59,400,000	1	49,346,800		0	0					1	49,346,800	100	83.08

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				1,213,825,000		594,017,450		300,000,000	201,013,000		192,104,500		95.57		786,121,950		64.76	
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur	stel	526	1,213,825,000	382	594,017,450	125	300,000,000	201,013,000	145	192,104,500	100	95.57	527	786,121,950	100	64.76	0
4	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				215,000,000		102,583,000		50,000,000	15,000,000		15,000,000		100.00		117,583,000		54.69	
a	Pengamanan dan Pengawasan	Terselenggaranya pengamanan dan pengawasan dan pengawalan protokoler	kecamatan	100	215,000,000	80	102,583,000	20	50,000,000	15,000,000	20	15,000,000	100	100.00	100	117,583,000	100	54.69	
D	Urusan Perdagangan																		
1	Program Pembinaan Pedagang				570,000,000		407,197,900		200,000,000	200,000,000		126,541,000		63.27		533,738,900		93.64	
a	Pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCT)	Terlaksananya Pemberantasan barang kena cukai ilegal	kecamatan	83	570,000,000	66	407,197,900	20	200,000,000	200,000,000	20	126,541,000	100.00	63.27	86	533,738,900	103.61	93.64	

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Data Pokok Pembangunan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung kondisi 5 (lima) tahun terakhir (2014-2018) di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

a. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab.

Untuk memperoleh angka indeks rasa aman, didapatkan dari survey indeks pembangunan masyarakat.

Realisasi indeks rasa aman di Kabupaten Temanggung belum pernah melaksanakan perhitungan sampai dengan tahun 2018 dan baru akan dilaksanakan perhitungan mulai tahun 2019.

b. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja

mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumus Cakupan penegakan perda dan/atau perbup adalah Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan bupati yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan bupati yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan dikali 100%.

Cakupan penegakan perda dan perbup pada tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Cakupan Penegakan Perda dan Perbup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani	kasus	965	263	638	797	275
Pelanggaran Perda/Perbup yang dilaporkan atau dipantau	kasus	965	263	638	797	315
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	100	100	87,3

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, SIPD

Dari tabel yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa persentase cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati pada tahun 2014-2018 selalu 100% dikarenakan penanganan terhadap pelanggaran perda dan perbup tahun 2014-2018 penyelesaiannya hanya sebatas sosialisasi dan pembenahan sesuai prosedur tahapan awal. Sementara pada tahun 2018 menurun menjadi 87,3% disebabkan di tahun 2018 masih terdapat beberapa permasalahan pelanggaran Perda yang belum terselesaikan dikarenakan :

- a. Pemerintah Kabupaten Temanggung belum menyediakan tempat relokasi bagi sebagian PKL;
- b. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang zonasi PKL

Namun demikian, secara jumlah kasus pada tahun 2018 menurun dari tahun sebelumnya. Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup mengalami penurunan dikarenakan adanya Kawasan Tertib di 3 (tiga) lokasi yang dirintis menjadi proyek percontohan dan diterbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tertib di Kabupaten Temanggung, setiap hari dilaksanakan patroli rutin baik di pagi, siang maupun malam hari.

Adapun pelanggaran Peraturan Daerah di tahun 2018 dapat tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup
Tahun 2018

No.	Jenis Pelanggaran Perda	Perda / Perbup	Lokasi Kegiatan	Jumlah
1	K4	No. 12 tahun 2011	20 kecamatan di	249
2	PGOT	No. 3 tahun 2014	Kabupaten	23
3	IMB	No. 15 tahun 2011	Temanggung	1
4	Minuman Beralkohol	No. 5 tahun 2015		42
JUMLAH				315

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, SIPD Tahun 2018

Jenis Pelanggaran dimaksud sesuai dengan hasil giat operasi di lapangan terkait dengan perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, keindahan, ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila (PGOT), Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang IMB dan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol.

c. Rasio Petugas Satpol PP

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan beberapa indikator penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja. Kriteria umum meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur. Sedangkan kriteria teknis meliputi: klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis.

Rumus untuk memperoleh angka rasio petugas satpol pp adalah jumlah anggota Satpol PP dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Rasio petugas Satpol PP tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Rasio Petugas Satpol PP
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

Uraian	satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk	orang	738.915	760.297	768.290	772.289	780.148
Jumlah anggota Satpol PP	orang	46	122	121	92	114
Rasio Petugas Satpol PP		1 : 3344	1 : 4553	1 : 6196	1 : 8394	1 : 6843
Jumlah Minimal	Orang	150	150	150	150	150

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, SIPD Tahun 2018

Menurut analisa penghitungan dan penetapan jumlah Pol PP dari kriteria tersebut, jumlah Satpol PP di Kabupaten Temanggung seharusnya sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai, sedangkan jumlah Pol PP yang ada di Kabupaten Temanggung baru tersedia sejumlah 114 personil sehingga terdapat kekurangan personil minimal sejumlah 36 personil sehingga diperlukan penambahan personil Polisi Pamong Praja agar dapat mendukung kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

**DATA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG
1	Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM	19611110 198503 1 018	Kasatpol PP	Pembina Utama Muda	IV/c
2	CUKUP SUDARYO, S.Sos.M.Si	19611119 198611 1 003	Kabid Tramtib	Pembina	IV/a
3	BUDI UTOMO	19610520 198503 1 009	Kasi Tibum & Tramas	Penata Tk. I	III/d
4	SUSILO	19630820 198607 1 002	Kasi Gakda	Penata Tk. I	III/d
5	HARTOYO, S.Sos	19630327 198803 1 012	Kasi Linmas	Penata Tk. I	III/d
6	YUNI WULANSARI, S. Sos, M.M.	19800627 200312 2 003	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Penata Tk. I	III/d
7	Dra. REGI BIARTAMI	19660409 200801 2 005	Kasubbag Umpeg	Penata	III/c
8	MUH AKBAR, S.Sos.,M.Si.		Staf	Penata Tk. I	III/d
9	AGUS SUGIARTO	19640803 198602 1 003	Staf	Penata Muda Tk. I	III/b
10	M U S T O F A	19640804 200604 1 005	Staf	Pengatur	II/c
11	RAKHMANTO	19650402 200701 1 023	Staf	Pengatur	II/c
12	JOKO SANTOSA	19730814 201001 1 003	Staf	Pengatur	II/c
13	SUPRIYATNO	19641212 198601 1 003	Staf	Pengatur Muda	II/a
14	DWI SUGENG	19700827 200604 1 004	Staf	Pengatur	II/c
15	PIYO WAHYUDI	19800704 200901 1 001	Staf	Pengatur	II/c
16	HERY WIDIYANTO	19801208 200901 1 005	Staf	Pengatur	II/c
17	MIFTACHUROHMAN	19801218 200901 1 001	Staf	Pengatur	II/c
18	M. FAKHRUDIN	19810212 200901 1 002	Staf	Pengatur	II/c
19	MUH. KHOERUN	19810315 200901 1 001	Staf	Pengatur	II/c
20	ARI RISBIYANTO	19810514 201001 1 007	Staf	Pengatur	II/c
21	JOKO NURSUSILO	19810723 201001 1 001	Staf	Pengatur	II/c
22	SUSILO HANDAYANI	19810807 201001 1 005	Staf	Pengatur	II/c
23	TRI HANDOYO	19811029 201001 1 002	Staf	Pengatur	II/c
24	NUR ZUBAIDI	19811219 201001 1 002	Staf	Pengatur	II/c
25	MARJOKO	19820102 201001 1 003	Staf	Pengatur	II/c
26	AFANDI	19820303 201001 1 003	Staf	Pengatur	II/c
27	IMAM SUPRIYANTO	19820425 201001 1 002	Staf	Pengatur	II/c
28	WARISO SUGIYARTO	19820728 201001 1002	Staf	Pengatur	II/c
29	SRI MASUFAH	19830125 201001 2 004	Staf	Pengatur	II/c
30	NUR SOLEH	19830305 201001 1 004	Staf	Pengatur	II/c
31	ANDI PURNAWAN	19830320 201001 1 002	Staf	Pengatur	II/c
32	MENIK DWI SETIYANTI	19830504 201001 2 003	Staf	Pengatur	II/c
33	EKA BUDI HARIYADI	19830525 201001 1 004	Staf	Pengatur	II/c
34	M. ABROR	19830601 201001 1 004	Staf	Pengatur	II/c
35	HERI KURNIAWAN	19830720 201001 1 004	Staf	Pengatur	II/c
36	EKO SUSILO	19840222 201001 1 003	Staf	Pengatur	II/c
37	DWI SETYORINI	19840305 201001 2 002	Staf	Pengatur	II/c
38	ELIYA	19840419 201001 2 004	Staf	Pengatur	II/c
39	FASA FARIZA TAMA	19840619 201001 1 004	Staf	Pengatur	II/c
40	EKO MAHANTORO	19840829 201001 1 002	Staf	Pengatur	II/c
41	FRANSISKA DIAN MAYASARI	19850518 201001 2 003	Staf	Pengatur	II/c
42	A M I R	19640223 200604 1 002	Staf	Pengatur Muda Tk. I	II/b

I	KECAMATAN TEMANGGUNG				
43	AGUS PURNOMO	19630818 199212 1 001	Staf	Penata Muda Tk. I	III/b
44	YASIN			Pengatur Muda Tk. I	II/b
II	KECAMATAN KRANGGAN				
45	AKHMAD MURDIYANTO	19610618 198903 1 012	Staf	Penata Tk. I	III/d
III	KECAMATAN PRINGSURAT				
46	SARIJANTO	19700225 199003 1 003	Staf	Penata Muda	III/a
47	JOKO SANTOSO	19680925 198903 1 004	Staf	Penata Muda	III/a
48	SUHARMAN	19811127 201001 1 001	Staf	Pengatur	II/c
49	Y. ANDRI GUNAWAN	19820926 201001 1 003	Staf	Pengatur	II/c
IV	KECAMATAN TEMBARAK				
V	KECAMATAN TLOGOMULYO				
50	MUHLASIN	19670115 199303 1 007	Staf	Pengatur Muda Tk. I	II/b
51	HEPI WALUYO	19801020 200901 1 001	Staf	Pengatur	II/c
52	TAAT SUPRIYONO	19820406 201001 1 003	Staf	Pengatur	II/c
53	MAMIK SLAMET	19661028 200701 1 007	Staf	Juru	I/c
VI	KECAMATAN SELOPAMPANG				
54	MUJI ARUM	19740830 200901 1 004	Staf	Juru Muda	I/a
55	MUHAMAD SUNHAJI	19641230 200701 1 007	Staf	Pengatur	II/c
VII	KECAMATAN KEDU				
56	WINARKO	19800818 200901 1 003	Staf	Pengatur	II/c
57	MUCHAMAD MA'RUF	19820823 201001 1 002	Staf	Pengatur	II/c
58	TUSIMAN		Staf	Pengatur	II/c
VIII	KECAMATAN BULU				
59	BENI ARIYANTO	19830813 201001 1 003	Staf	Pengatur	II/c
IX	KECAMATAN PARAKAN				
60	CHAMIDI	19640512 198903 1 017	Staf	Penata Muda	III/a
61	TUWARDI	19730630 200701 1 012	Staf	Juru Tk. I	I/d
62	SUKISNA	19660220 201001 1 002	Staf	Juru Muda	I/a
63	MUHAMAD LUTFI	19690810 198903 1 009		Penata Muda Tk. I	III/b
X	KECAMATAN KLEDUNG				
64	WALIYADI	19800827 200901 1 003	Staf	Pengatur	II/c
65	SRI LANGGENG	19810825 201001 1 004	Staf	Pengatur	II/c
66	RISWONO	19830930 201001 1 002	Staf	Pengatur	II/c
67	ANANG KUSNIAWANTO	19840125 201001 1 001	Staf	Pengatur	II/c
XI	KECAMATAN BANSARI				
68	SUGENG HARIYADI	19711122 199203 1 004	Staf	Penata Muda Tk. I	III/b
69	AGUS MARTONO	19700828 200604 1 008	Staf	Pengatur Muda Tk. I	II/b
XII	KECAMATAN NGADIREJO				
70	PARIYANTO	19801229 200901 1 002	Staf	Pengatur	II/c
71	SUWARDI	19681225 199303 1 006		Penata Muda Tk. I	III/b
XIII	KECAMATAN CANDIROTO				
72	ROCHYANTO	19640206 198610 1 002	Staf	Penata Muda	III/a
73	A. DAWUD	19700605 200701 1 035	Staf	Juru	I/c
XIV	KECAMATAN WONOBOYO				
74	SETIYARTO	19630607 199403 1 005		Pengatur	II/c

75	SRI WAHONO	19770618 200604 1 003		Pengatur	II/c
76	JOKO IRWANTO			Juru	I/c
XV	KECAMATAN TRETEP				
XVI	KECAMATAN BEJEN				
77	SUBIYARTONO	19630824 198603 1 010	Staf	Penata Muda	III/a
78	SUGIHARTO	19611013 198702 1 010	Staf	Pengatur Tk. I	II/d
XVII	KECAMATAN JUMO				
79	DAHMAN	19621108 200701 1 005	Staf	Juru	I/c
XVIII	KECAMATAN GEMAWANG				
80	TRI SUMBOGO	19671127 198811 1 001	Staf	Penata Muda	III/a
81	AFIK WIDIYANTO	19820518 201001 1 004	Staf	Pengatur	II/c
XIX	KECAMATAN KANDANGAN				
XX	KECAMATAN KALORAN				
82	TEGUH MUARIFIN	19820508 201001 1 004	Staf	Pengatur	II/c
83	KODIM	19621201 198703 1 017	Staf	Pengatur Tk. I	II/d
84	MUSTOFA	19680502 198608 1 001	Staf	Pengatur	II/c
	BANPOL PP 2018				
85	AGUNG SANTOSA				
86	ALDO MAULANA PUTRA				
87	ANDREAS PUTRA AJI SETIAWAN				
88	ARDIAN BAGAS PRATAMA				
89	AZIZ SOLICHUDIN				
90	BAYU NUGROHO				
91	CHOIRUL MUBAROK				
92	ERLINA RISKI ASTITI				
93	FASA WIDI KURNIAWAN				
94	GHUFRON AFFISINA				
95	IWAN WIDODO				
96	LAILIA NUR FARIDA				
97	LINDA ZARZA ARLITA				
98	MUHAMMAD SALAFUDIN				
99	MUKHAMAD ABDUL BASIT				
100	MUHAMMAD JA'VAR SODIK				
101	NAZARUDIN ULYA				
102	NURVITA OCTIANA				
103	OKTA DWI NUGROHO				
104	OKTA MARY BAGUS HARJANTO				
105	PAMUNGKAS MEILISA PUSPITASARI				
106	RATNA MAUDY INDRAWASNO				
107	RIZKI NUR FAEDAH				
108	RIZKY YANASARI				
109	ROHMAT AHYAKUL KARIM				
110	ROSSI DEWI RIANA				
111	THUBAGUS NUR MA'ARIF				
112	WAHYU AHMAD FAUZI				
113	WILDAN MAULANA BAEDHOWI				
114	YULIYANA				

Di Kecamatan Tretep, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Kandangan tidak terdapat Satpol PP dikarenakan petugas Satpol PP melimpah menjadi staf kecamatan dan beberapa personil yang telah purna tugas.

d. Rasio Linmas per RT

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas di Kabupaten/Kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan, menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

Untuk memperoleh angka rasio linmas dapat digunakan rumus Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota dibagi jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota.

Rasio Linmas tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Rasio Jumlah Linmas Per RT
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

NO	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Linmas	8.789	8.797	9.158	8.172	8.184
2.	Jumlah RT	5.792	5.553	5.692	5.692	5.916
3.	Rasio	1,5	1,5	1,6	1,4	1,3

Sumber : SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas tercantum bahwa rasio jumlah anggota Linmas per RT telah mencukupi akan tetapi sebaran anggota Linmas belum merata disebabkan karena tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup banyak, hal tersebut dikarenakan banyak anggota Linmas yang meninggal, tidak aktif maupun berusia lanjut, disamping itu animo masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangatlah kecil. Anggota Linmas tidak mendapatkan gaji, tunjangan bahkan santunan sakit maupun kematian.

Namun dengan jumlah anggota Linmas yang ada telah dapat dikatakan Linmas Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.

Jumlah anggota Linmas di Kabupaten Temanggung tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.7

Tabel sebaran anggota Linmas per kecamatan
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Linmas (orang)	Rasio
1.	Bulu	47.895	536	1 : 89
2.	Tembarak	30.464	359	1 : 84
3.	Temanggung	81.627	864	1 : 94
4.	Pringsurat	51.238	456	1 : 112
5.	Kaloran	44.954	349	1 : 128
6.	Kandangan	51.218	440	1 : 116
7.	Kedu	57.955	325	1 : 178
8.	Parakan	52.877	447	1 : 118

9.	Ngadirejo	55.445	470	1 : 117
10.	Jumo	29.655	375	1 : 79
11.	Tretep	20.972	261	1 : 80
12.	Candiroto	32.672	386	1 : 84
13.	Kranggan	48.187	367	1 : 131
14.	Tlogomulyo	22.793	383	1 : 59
15.	Selompampang	19.927	322	1 : 61
16.	Bansari	23.881	357	1 : 66
17.	Kledung	27.603	409	1 : 67
18.	Bejen	21.269	405	1 : 52
19.	Wonoboyo	26.160	346	1 : 75
20.	Gemawang	33.356	312	1 : 106
Jumlah		78.148	8.184	1 : 9

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, SIPD Tahun 2018

e. Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 69 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri, bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran, maka cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota dijabarkan sebagai berikut:

- a. WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- b. WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana

pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- c. WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran dengan tujuan antara lain :

- 1) Pengurangan resiko kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban.

Dengan penambahan pos layanan pemadam dapat memangkas waktu tanggap darurat (*Response time rate*). Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang tidak

membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*). Pemerintah kabupaten/ kota dalam membentuk suatu kawasan WMK harus menyediakan: Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran beserta garasi untuk mobil pemadam dan letak Pos Pemadam berada di tengah suatu kawasan WMK;

- a. Mobil Pemadam meliputi 1 unit truk pemadam kebakaran, 1 unit truk tanki air/ *water supply* dan 1 unit mobil *rescue*;
- b. Menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, minimal 6 personil dalam 1 unit kendaraan termasuk Alat Perlindungan Diri (APD) bagi personil Damkar;
- c. Sarana dan prasarana pada tanggap darurat serta sarana pendukung penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran maupun non kebakaran.

Rumus cara perhitungan indikator adalah:

$$\frac{\text{Jumlah luas WMK kabupaten/kota}}{\text{Jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/ kota}} \times 100 \%$$

Dalam Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Temanggung terdapat 6 (enam) pos pelayanan WMK yaitu Pos Mako Temanggung, Pos Pemadam Candiroto, Pos Pemadam Pringsurat, Pos Pemadam Ngadirejo, Pos Pemadam Parakan, Pos Pemadam Tembarak.

Sampai saat ini baru berdiri 3 (tiga) pos pelayanan Pemadam Kebakaran yaitu:

1. Pos Mako Temanggung yang berada di lingkungan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, beralamat di Jl. Lingkar Utara Maron Temanggung;
2. Pos Pemadam Wilayah Candiroto yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Candiroto, beralamat di

- Jl. Candirototo no. 32;
3. Pos Pemadam Wilayah Pringsurat yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Pringsurat, beralamat di Jl. Raya Pringsurat no. 1.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

Uraian	satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	20,21%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%
Jumlah WMK Kabupaten/Kota	km2	176	528	528	528	528
Jumlah wilayah Kabupaten	km2	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65

Sumber : SIPD Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

Dari data di atas, cakupan penanganan bencana kebakaran kabupatentidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2018 tidak dapat terlaksana pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatassejumlah 60%dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

f. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Rumus tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah :

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

Realisasi persentase Tingkat Waktu Tanggapdi Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

NO	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit	19	19	33	41	44
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK	45	42	50	69	63
3.	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate-%)	42,2%	45,2%	66%	59,4%	69,8%

Sumber : Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Response time memiliki beberapa faktor kendala sebagai berikut:

- a) Lokasi kasus kebakaran yang berbeda-beda tempat setiap tahunnya;
- b) Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran;
- c) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran;
- d) kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas;
- e) Perubahan kondisi lalu lintas;
- f) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
- g) Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
- h) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di

Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.


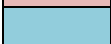
i) Belum optimalnya koordinasi instansional.

Data kejadian kebakaran selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Data Kebakaran Kabupaten Temanggung
Tahun 2018

No.	Tanggal	Info Masuk	Sampai Lokasi	Selesai	Pemilik	Alamat	Fungsi Bangunan Yang Terbakar
1	23/01/2018	16:40	16:50	17:26	ONGGO S	RT03RW 1 NGIJINGAN CANDIMULYO ,KEDU	RUMAH
2	03/02/2018	14:00	14:15	16:00	IBU IMBUH.BPK NUR AMIN	BENDUNGAN RT02 RW01 TREPTEP	RUMAH
3	15/02/2018	06:15	06:30	17:30	PT ALBASIA KAYU PRIMA	JL RAYA KRANGGAN PRINGSURAT KM 3 KRANGGAN	PT KAYU LAPIS
4	01/03/2018	14:50	15:00	15:30	GOR BAMBU RUNCING TMG	KOWANGAN TEMANGGUNG	GEDUNG OLAHRAGA
5	11/03/2018				BP NURROHIM	GEBLOK, JETIS, KALORAN	RUMAH
6	11/03/2018	12:05	12:20		BP HARDIONO	DSN GETUK DS GETAS, KALORAN	RUMAH
7	18/03/2018	02:05	02:20		BPK TRI	PLOSO GESING RT01 RW01 KANDANGAN TEMANGGUNG	WARUNG
8	29/03/2018	09:35	09:45	11:13	BP ASYONO	KRAJAN RT02/02 MUNTUNG CANDIROTO	RUMAH
9	29/03/2018	18:15	18:30	19:30		BADRAN, RT01 RW05 BADRAN KRANGGAN	RUMAH
10	04/04/2018	05:35	05:45	06:45	BP SUNARTO	GIANTI,GIANTI TEMANGGUNG	RUMAH
11	05/04/2018	21:00	21:10	22:00	BP YOSEP	KUPEN KLIWON, KRANGGAN	WARUNG
12	12/04/2018	07:50	07:55	8:30	IBU TIJEM	GUNUNG PAYUNG CANDIROTO	RUMAH
13	14/04/2018	23:00	23:15	24:00	IBU SUPARDI	KARANGGEDONG,NGADIREJO	RUMAH DAN BENGKEL
14	16/04/2018	12:00	12:05	12:15	BPK UNANG	PUNTUK SARI, RT01 RW08 TEMANGGUNG 1,TEMANGGUNG	HOME INDUSTRI
15	20/04/2018	19:50	20:10	21:00	BP GIMAN	KAUMAN RT02 RW01 KEC JUMO	RUMAH
16	01/05/2018	10:22	10:27	11:45	BP.SOELISTYO KURNIAWAN(LARIS)	JL.KS TUBUN TEMANGGUNG	SWALAYAN
17	03/05/2018	7:49	08:00	8:45	BP.ROFIK & BP.ASKUN	DSN .PRAMPelan 2 RT04 RW08. DS KEMLOKO KEC.TEMBARAK.	RUMAH TINGGAL
18	12/05/2018	07:57	08:10	8:57	BPK SHOLEH	KAUMAN BARU PARAKAN WETAN, RT04 RW07	BAN BEKAS
19	15/06/2018	14:20	14:45	16:10	BPK SARIYANTO	KABUNAN BANDUNG GEDE. KEDU	RUMAH
20	15/06/2018	16:18	16:25	17:10	BPK IMAM NUR SALIM	NGIJINGAN,CANDIMULYO,KEDU	RUMAH
21	15/06/2018	18:30	16:45		BAPAK ISMADI	NGESREP,NGUET,KRANGGAN	KANDANG AYAM
22	30/06/2018	07:40	07:48	8:13	BAPAK DIDIK	SEPIKUL MOJOTENGAH KEDU	RUMAH
23	05/07/2018	20:55	21:10	22:20	MUH CHOZIN	WATUKARUNG, DESA CAMPURSARI,BULU	RUMAH
24	08/07/2018	22:00	22:15		PT ALBASIA KAYU PRIMA	JL RAYA KEDU KM 3	PABRIK
25	10/07/2018	00:55	01:10	2:07	MUSTOFA	PARE RT03 RW0 KRANGGAN	KANDANG AYAM
26	10/07/2018				SRIYONO	KATEKAN RT01/RW 02, KATEKAN,NGADIREJO	RUMAH
27	15/07/2018	15:51	16:00	16:30	BPK SATRO	KALI GETAS,PRINGSURAT, PRINGSURAT	PEKARANGAN
28	22/07/2018	17:00	17:10	17:30		JL RAYA NGADIREJO - CANDIROTO,CANDIROTO	KEBAKARAN LAHAN
29	24/07/2018	21:41	21:50	22:30	IBU UDYAN LESTARI	PAKISAN RT 01 RW02 KEDU	RUMAH
30	28/07/2018	13:00	13:10		BP WALUYO	NGUWET,KRANGGAN	LAHAN
31	02/08/2018	14:36	14:50	15:00	BPK SUTİYONO	LOKENTENG RT02 RW05, MALEBO,KANDANGAN	RUMAH

32	26/08/2018	11:00	11:10		CV LARASATI ABADI JAYA	DSN TEGESAN RT02 RW04 SAMIRAN KANDANGAN	PABRIK
33	30/08/2018	17:25	17:35	23:45	CV DADI MULYO	RT01 RW11 PINGIT, PRINGSURAT	LIMBAH PABRIK
34	31/08/2018	23:04	23:35	1:05	ISUPIYAH, MUNJINAH, ZAENAL, YAMINAH, SISWANTO	TAJEM RT03 RW01, KARANGTEJO JUMO, TEMANGGUNG	RUMAH
35	05/09/2018	20:00	20:10	20:30	BP SLAMET	TLEDOK SIDOREJO, CANDIROTO	RUMAH
36	08/09/2018	01:05	01:15			PINGIT PRINGSURAT	SAMPAH PABRIK
37	09/09/2018	22:10	22:18	23:00	PASAR SAPI	BADRAN, KRANGGAN	LAHAN
38	10/09/2018	11:26	11:32	12:35	LAHAN	JLN.DEWI SARTIKA TEMANGGUNG	LAHAN
39	14/09/2018	09:58	10:10	12:00	BP RINTOKO	TEGONG, JAMUSAN JUMO	POM MINI + GUDANG
40	15/09/2018	13:45	13:55	15:58	BP DWI RUSTAMAJI	PARE, MENDIRAT, KRANGGAN	KAROSERI
41	21/09/2018	21:26	21:40		BP FAJAR	GEDIPAN PINGIT, PRINGSURAT	WARUNG
42	21/09/2018	16:15	16:25		IBU SRI KUSYANTI	MUNGENG TEMANGGUNG	RUMAH
43	22/09/2018	16:21	16:30		BP SITUMEANG	WALITELON SELATAN, TEMANGGUNG	RUMAH
44	24/09/2018	17:00	17:20		BP KOHAR	SAYANGAN RT02 RW02 NGADIREJO	GEDUNG BIOSKOP LAMA
45	30/09/2018	10:12	10:20		BP FAORI	RT05 RW11 KUPEN, GUNUNG KEKEP, PRINGSURAT	RUMAH
46	04/10/2018	19:03	19:15	19:03		LUNGGE KEC TEMANGGUNG	LAHAN
47	05/10/2018	10:00	10:10	11:00	BP DANANG ADI WICAKSONO	DSN TENTREM RT03 RW02 DS ROWO, KANDANGAN	RUMAH
48	07/10/2018	13:38	13:50		BP YAMIDI, BP CIPTO	TEMPURAN LOSARI TLOGOMULYO	RUMAH
49	07/10/2018	17:15	17:25	18:30		PINGIT KRAJAN DESA PINGIT KEC PRINGSURAT	LAHAN
50	09/10/2018	08:15	08:25	08:30	BP DEDEH	NGLANGON WALITELON TEMANGGUNG	GEROBAK
51	11/10/2018	09:30	10:00		BP TURWANTO	RT07/05 GINTUNG, GIRIPURNO NGADIREJO	RUMAH
52	11/10/2018	13:00	13:30	15:30	BP RAME	KALORAN	LAHAN
53	11/10/2018	08:00	08:30			KEMLOKO TEMBARAK	HUTAN
54	13/10/2018	08:00	08:30			KEMLOKO TEMBARAK	HUTAN LINDUNG
55	21/10/2018	16:00	16:10	17:00	BP BUDIYONO	RT01 RW03 PROJO, MADURES0 TMG	GUDANG ALAT DEPO
56	03/11/2018	16:35	16:25	17:00	BP DARWOTO	RT02 RW04 WALITELON UTARA	TEMPAT USAHA KAYU KUSEN
57	04/11/2018	15:00	15:10	15:30		PERUMAHAN DANUPAYAN BULU	KEBUN SALAK
58	06/11/2018	09:30	10:00	11:44	BP SUKARTO	KRUWISAN RT02 RW02 KLEDUNG	RUMAH
59	14/11/2018	11:45	11:50	13:00	BP ARI WIDODO	KRAJAN NGIPIK KEC PRINGSURAT	PABRIK
60	15/11/2018	02:00	02:30	06:00	SD DAN SMP 2 WONOBOYO	RT06 RW02 CEMORO, WONOBOYO	BANGUNAN SEKOLAH
61	17/11/2018	08:40	8:50		IBU AMBAR	RUKO PLAZA KEC TEMANGGUNG	RUKO
62	25/11/2018	16:36	17:00	17:14	BP Z Aidun	MUNCAR KRAJAN RT01 RW01 GEMAWANG	RUMAH
63	22/12/2018	20:09	20:20	20:31	YS HARNANTO	BRAJAN RT02 RW03 SIDOREJO TEMANGGUNG	RUMAH

Keterangan Warna =  : Kejadian di luar jangkauan respon time
 : Kejadian yang tertangani dalam respon time

g. Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, dan kesehatan)

Penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan dan kesehatan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan

demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

Rumus tingkat penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketentraman, keindahan dan kesehatan) di Kabupaten/Kota adalah =

$$\frac{\text{Pelanggaran K4 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K4 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

Pembilang: Pelanggaran K4 yang terselesaikan di tahun bersangkutan.

Penyebut: Jumlah pelanggaran K4 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP di tahun bersangkutan. Satuan Indikator Persentase (%)

Tabel 2.11
Tingkat penyelesaian pelanggaran K4
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pelanggaran K4 (kasus)	965	263	638	797	249
2.	Jumlah pelanggaran K4 yang diselesaikan (kasus)	965	263	638	797	209
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 (%)	100	100	100	100	87,3

Sumber : Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel di atas tercantum bahwa jumlah pelanggaran K3 pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah kasus, hal ini disebabkan oleh mulai diaktifkannya Kawasan Tertib di beberapa lokasi yang setiap hari dilaksanakan patroli rutin. Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 Kabupaten Temanggung adalah 87,3% dikarenakan untuk Kabupaten Temanggung yang belum memiliki PPNS sehingga tingkat penyelesaian pelanggaran Perda hanya pada sampai tahapan preventif non yustisial berupa peringatan dan pembinaan saja.

Data pelanggaran Peraturan Daerah/Perda Nomor 12

Tahun 2011 tentang K4 Tahun 2018 tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Tabel Data Pelanggaran Perda K4 per kecamatan
Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Pelanggaran
1	Temanggung	102
2	Tlogomulyo	4
3	Tembarak	6
4	Selopampang	3
5	Kranggan	20
6	Pringsurat	5
7	Kaloran	7
8	Kandangan	10
9	Kedu	11
10	Bulu	12
11	Jumo	4
12	Parakan	29
13	Kledung	4
14	Bansari	3
15	Ngadirejo	10
16	Candiroto	7
17	Wonoboyo	2
18	Tretep	2
19	Bejen	4
20	Gemawang	4
Jumlah Total		249

h. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

Rumus persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Banyaknya kelompok patroli x 3 kali patroli dalam sehari dibagi Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota dikali 100%.

Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.13
Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

NO	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Banyaknya patroli dalam satu tahun	20	20	20	48	50
2.	Jumlah kecamatan	20	20	20	20	20
3.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1	1	1	2,4	2,5

Sumber : Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, cakupan kegiatan patroli siaga dari tahun ke tahun cenderung meningkat dengan dukungan penambahan personil, meskipun tidak diikuti peningkatan sarana prasarana secara signifikan.

Data Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2018 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.14
 Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 Tahun 2018

No	Kecamatan	Lokasi	Jumlah Keg. Patroli	Hasil
1	Temanggung	Aloon-aloon, Taman Pengayoman, tugu Pancasila, Taman Kartini, Pikatan, Sroyo, Terminal, Bong Maron	10 kali kegiatan patroli	Ditemukan pelanggaran perda K4 Untuk patroli malam hari hampir setiap malam petugas patroli mendapatkan sekumpulan anak muda mengkonsumsi miras (ciu). Untuk selanjutnya dilakukan pembinaan ditempat.
2	Kranggan	Taman Kaliprogo, Bendungan Selis, Komplek pasar.	2 kegiatan patroli	Aman terkendali
3	Tlogomulyo	Bukit Cinta, Pandemulyo	2 kegiatan patroli	Aman terkendali
4	Pringsurat	Bong Cina	1 kegiatan patroli	Aman terkendali
5	Kedu	Komplek pasar, sepanjang Jl. Kedu-Parakan.	2 kegiatan patroli	Banyak ditemukan pelanggaran Perda K4 (pemasangan spanduk dan baner).
6	Kandangan	Sigrowong dam Kembangsari,	2 kegiatan patroli	Ditemukan beberapa pelajar yang membolos

		embung Tlogo Pucang, Wisata Watu Layah.		sekolah di Sigrowong. (dilakukan pembinaan dikantor Satpol PP Temanggung)
7	Jumo	Gunung Besar.	1 kegiatan patroli	Aman terkendali
8	Ngadirejo	Kawasan Jumprit, Kompleks pasar, Candi Pringapus, Liyangan.	2 kali kegiatan patroli	Masih ditemukan galian Gol. C ilegal diwilayah Liyangan.
9	Candiroto	Kompleks pasar sayur	1 kegiatan patroli	Aman terkendali
10	Kledung	Embung Kledung, Rest Area, Komplek Jembatan Sigandul	3 kegiatan patroli	Masih ditemukan galian Gol. C manual di wilayah Kwadungan Gunung, Kledung.
11	Parakan	Komplek Pasar, Taman Bambu Runcing, Taman Panjangsari	5 kegiatan patroli	Ditemukan pelanggaran Perda K4 (spanduk dan baner), menjamurnya PKL di wilayah Parakan dan seputaran Paar Legi Parakan. Untuk patroli malam hari masih ditemukan beberapa pasangan muda mudi sampai larut malam (pembinaan ditempat)
12	Bulu	Pintu Irigasi	1 kegiatan	Aman terkendali

		Ds. Campursari	patroli	
13	Bejen	Perbataan Temanggung Kendal (Patean)	2 kali Kegiatan Patroli	Penertiban Galian Gol. C dibawah jembatan Patean (sudah berhenti)
14	Wonobojo	Sepanjang Jl. Wonobojo- Tretap. Patroli Wilayah	2 kali kegiatan patroli	Aman terkendali
15	Bansari	Sepanjang Jl. Parakan- Bansari Kledung	2 kali kegiatan patroli	Aman terkendali
16	Tembarak	Sepanjang Jl. Tembarak- Selopampang, Wisata Curug Trocoh.	2 kali kegiatan patroli	Aman
17	Selopampang	Sepanjang Jl. Selopampang- Kranggan.	2 kali kegiatan patroli	Aman terkendali
18	Tretap	Sepanjang Jl. Wonobojo- Tretap, Wisata Kembangarum	2 kali kegiatan patroli	Aman terkendali
19	Gemawang	Curug Lawe, sepanjang Jl. Gemawang.	2 kali kegiatan patroli	Aman terkendali
20	Kaloran	Sepanjang Jl. Kaloran atau wilayah Kec. Kaloran.	2 kali kegiatan patroli	Ditemukan beberapa pelanggaran berkaitan dengan Perda K4 (pemasangan spanduk dan baner)
Jumlah	20 kecamatan		50 x patroli	

i. Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran. Cara perhitungan/Rumus perhitungan prosentase aparatur pemadam yang memenuhi standar kualifikasi adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi}}{\text{Jumlah Satgas Damkar}} \times 100\%$$

Tabel 2.15
Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

NO	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar	12	14	17	19	18
2.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran	17	17	44	54	53
3.	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	70,6%	82,4%	38,6%	35,2%	33,9%

Sumber : Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Sesuai table diatas prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Kabupaten Temanggung tahun di tahun 2018 mengalami penurunan hal itu terjadi karena ada personil yang

memenuhi standar kualifikasi pensiun.

Penambahan anggota yang berstatus *supporting staff* sebanyak 40 personil selama 2016-2017 menjadikan jumlah aparatur pemadam kebakaran meningkat, akan tetapi peningkatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi.

Jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dalam setiap tahun hanya mengalami sedikit peningkatan, terkendala dengan minimnya anggaran untuk biaya diklat bagi petugas dan status Satgas Damkar yang merupakan *supporting staff* sehingga tidak dapat dibiayai dari biaya Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Daftar anggota pemadam yang memiliki sertifikat tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.16

Daftar Personil Seksi Pemadam Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2018

No.	Nama	NIP	Jabatan	Golongan/ Ruang	Sertifikat
1	2	3	4	5	6
1	BAMBANG SUPRIYONO	19670228 199303 1 009	Staf	III/b	Pelatihan Fire Fighting
2	FARID NUR IKHSAN	19850324 200801 1 005	Staf	II/c	Pemadam Tingkat II
3	KHAMIM MUSTAQIM	19830513 201001 1 003	Staf	II/b	Pemadam Tingkat II
4	DEDY CHRISTANTO	19811220 200801 1 008	Staf	II/c	Pemadam Tingkat I
5	WALDI HARSANTO	19770206 200801 1 009	Staf	I/c	Pemadam Tingkat I
6	ARIF BUDI HARSANTO	19840609 201001 1 001	Staf	II/c	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
7	EDI SUSILO	19800705 200901 1 002	Staf	II/c	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
8	MUSTRIWANTO	19760229 200701 1 005	Staf	II/d	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
9	TONI KUSTANTO	19830418 201001 1 002	Staf	II/b	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
10	ACHMAD SYAFI'I	19760622 200701 1 007	Staf	II/a	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
11	ELING SETIYONO	19830808 201001 1 002	Staf	II/b	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
12	ARIF SOFWAN	19840609 201001 1 001	Staf	II/b	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
13	TRI ADE GIANTARA	19801104 200801 1 010	Staf	II/c	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
Satgas Pemadam Kebakaran					
14	AHMAD SYARIF A.	-	Satgas	-	-

15	ANDI ACHMAD MUZAKAR	-	Satgas	-	-
16	ANGGIANSYAH MADHON S.	-	Satgas	-	-
17	ARDYARDANY PUTRA	-	Satgas	-	-
18	ARLI TAUFIK	-	Satgas	-	-
19	AWAN SUKMA FEBRIYANTO	-	Satgas	-	-
20	BAYU KURNIAWAN	-	Satgas	-	-
21	BAGUS SATRIO W.	-	Satgas	-	-
22	BHURHANUDIN ALFANI R.	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
23	DAVIT HIMAWAN UTOYO	-	Satgas	-	-
24	DHIMAS BANGKIT PANUNTUN	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
25	FAJAR PRASTIYO	-	Satgas	-	-
26	FAJRIYAH WIDI ASTUTI	-	Satgas	-	-
27	FANDI CAHYA PRADANA	-	Satgas	-	-
28	HAFIDZ NURUL AMIN	-	Satgas	-	-
29	HARIS PRASETYO	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
30	HASAN TAFSIR	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
31	IRA CAHYANING	-	Satgas	-	-
32	ISROK HADIYANTO	-	Satgas	-	-
33	IVAN PAMUNGKAS	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
34	JONTA AYOMAGE AKITA	-	Satgas	-	-
35	KENJI EGI RIKO SAPUTRO	-	Satgas	-	-
36	KOKO SEPTIANTORO	-	Satgas	-	-
37	LUKMAN KHAQIM	-	Satgas	-	-
38	MARTHA EDY FIRMANSYAH	-	Satgas	-	-
39	MOCHAMAD FAIZAL R.	-	Satgas	-	-
40	MUHAMMAD HASBI ASSIDIQI	-	Satgas	-	-
41	MUHAMMAD NURROKHIM	-	Satgas	-	-
42	MUHAMMAD TOYYIB NUR RAHMAN	-	Satgas	-	-
43	NUR RIFA FADHLIKA	-	Satgas	-	-
44	OVAN ADI RIYANTO	-	Satgas	-	-
45	PANGESTU MULYA NOVANTO	-	Satgas	-	-
46	RUDI PRASETYO	-	Satgas	-	-
47	SADDAM GIRI SANTOSO	-	Satgas	-	-
48	SEPTIAN DWI CAHYO AJI	-	Satgas	-	-
49	SLAMET ARIYANTO	-	Satgas	-	-
50	SUHUD KURNIAWAN	-	Satgas	-	-
51	TAUFIK PRASTYAWAN	-	Satgas	-	-
52	TULUS SETYANTO	-	Satgas	-	-
53	UJIEK PRASTIYO	-	Satgas	-	-

j. Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000 – 5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Mobil Damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh personil Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada di lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Di atas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

Cara perhitungan Persentase Cakupan WMK yang memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar Laik Pakai adalah :

$$\frac{\text{Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yg laik pakai}}{\text{Jumlah WMK atau Lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100\%$$

Tabel 2.17

Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter Pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

NO	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada WMK	5	6	10	10	10
2.	Jumlah mobil kebakaran pada WMK	6	7	13	13	13
3.	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	72,73%	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%

Sumber : Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Sebagian dari data tabel di atas sejak tahun 2016-2018 untuk prosentase rasio mobil Damkar tidak mengalami peningkatan atau penambahan armada baru meskipun beberapa dinyatakan tidak layak. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Sebagian armada pemadam kebakaran kondisinya sudah berumur dan spesifikasinya kurang handal untuk menempuh medan yang berat dengan membawa muatan air;
- b. Ada kendaraan yang rusak karena pernah mengalami kecelakaan saat menuju lokasi kebakaran. Dikarenakan keterbatasan anggaran untuk perbaikan chassis dan body kendaraan sehingga torsi/ tenaga dan performa kendaraan kurang maksimal.

Data kendaraan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
Tahun 2018

No	Nama Kendaraan	Nopol	Merk	Seri	Tahun Pembuatan	Kondisi kendaraan
1	PMK 01	AA 9591 LE	Isuzu	FTR 33/200 Ps	2004	Layak
2	PMK 02	AA 9590 LE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	Kurang layak
3	PMK 03	AA 9589 LE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	Kurang layak
4	TA. 4000L	AA 9533 JE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	Kurang layak
5	Tanki Air. 5000L	AA 9597 ME	Mitsubishi	FE 349/ 120 Ps	2006	Layak
6	PMK 04 (Ziegler)	AA 9585 PE	Hino	Dutro/ WU342R/ 130 HD	2012	Kurang layak
7	FIRE JEEP	AA 9593 AE	Toyota	Hilux Pick Up 2,5L D	2014	Layak
8	AYYAX CSR	AA 9599 BE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2016	Layak
9	TA CSR	AA 9531 KE	Mitsubishi	Colt Diesel FE Super HD	2016	Layak
10	AYYAX PRINGSURAT	AA 9596 AE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2015	Layak
11	TA PRINGSURAT	AA 9560 JE	Isuzu	NKR 71 E2-2	2015	Layak
12	AYYAX CANDIROTO	AA 9597 AE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2015	Layak
13	TA CANDIROTO	AA 9559 JE	Isuzu	NKR 71 E2-2	2015	Layak

k. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Rumus indikatornya sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Pemadam dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah.}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X}} \times 100\%$$

Tabel 2.19
Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

NO	Uraian	Tahun
		2018
1.	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Pemadam Kebakaran	44
2.	Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X	63
3.	Capaian layanan SPM Sub Urusan kebakaran di kabupaten/ kota yang dilaksanakan Perangkat Daerah	69,8%

Sumber : Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Perhitungan untuk layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung baru dilaksanakan pada tahun 2018 dikarenakan merupakan SPM yang baru ditetapkan di tahun 2018

Dari data tabel 2.17 untuk capaian layanan SPM Sub urusan kebakaran kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran baru tercapai 69,8% dikarenakan luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candioto serta minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemadam kebakaran Kabupaten Temanggung.

1. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan seksi Pemadam Kebakaran

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran.

Rumus indikatornya sebagai berikut

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh kelompok relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan seksi Pemadam Kebakaran

$$\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X}} \times 100\%$$

Dikarenakan SPM baru dan muncul di tahun 2018 dan belum adanya rintisan pembentukan Balakar oleh Perangkat Daerah yang menaungi karena keterbatasan anggaran, maka indikatornya masih kosong.

Data pendukung untuk jumlah kasus kebakaran tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebelumnya yaitu tabel 2.9

m. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) oleh Seksi Pemadam Kebakaran meliputi:

- a. Evakuasi sarang tawon;
- b. Penanganan pohon tumbang;
- c. Penanganan kecelakaan lalu lintas;

- d. Percobaan bunuh diri;
- e. Evakuasi korban terjatuh di sumur;
- f. Evakuasi korban hanyut;
- g. dll.

Rumus indikatornya yaitu:

Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah di kabupaten/ kota dalam tahun X.

Untuk satuan indikatornya adalah jumlah dan jenis, berikut data layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran)

Tabel 2.20

Tabel daftar penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Seksi Pemadam Kebakaran

No.	Tanggal	Lokasi Kejadian	Keterangan
1	28 Januari 2018	Jalan Raya Jumo-Muntung	Pohon Tumbang
2	28 Januari 2018	Jalan Kandangan-Kaloran	Pohon Tumbang
3	28 Januari 2018	Jalan Raya Magelang-Semarang	Pohon Tumbang
4	29 Januari 2018	Mondoretno Kec Bulu	Pohon Tumbang
5	31 Januari 2018	Muntung, Candiroto	Pohon Tumbang
6	23 Februari 2018	Kemiriombo	LONGSOR
7	27 Februari 2018	Mujahidin rt06/04 Temanggung	Evakuasi Sarang Tawon
8	30 Maret 2018	Kecamatan Kedu	Pohon Tumbang
9	20 Maret 2018	Kadepokan Tlogopucang	longsor
10	05 April 2018	Butuh 02/05 Temanggung	Evakuasi Sarang Tawon
11	08 April 2018	Demangan 02/03 Kedu	Evakuasi Sarang Tawon
12	17 April 2018	Perum Lima sekawan 03/02 Jampiroso	Evakuasi Sarang Tawon
13	26 April 2018	Widoro Walitelon	solar tumpah
14	01 Mei 2018	Kauman Muntung Candiroto	Evakuasi Sarang Tawon
15	04 Mei 2018	Gondang Winangun Ngadirejo	Evakuasi Sarang Tawon
16	08 Mei 2018	Geneng Rt03/01 Kowangan	Evakuasi Sarang Tawon
17	15 Mei 2018	Walitelon Utara 03/04 Temanggung	Evakuasi Sarang Tawon
18	04 Juni 2018	Jembatan Krikil Geneng	solar tumpah

19	11 Juni 2018	Munding Kidul	Evakuasi Sarang Tawon
20	08 Juni 2018	Perum Paramedis Jurang Temanggung	Evakuasi Sarang Tawon
21	13 Juni 2018	Jl Lingkar Utara Maron	solar tumpah
22	19 Juni 2018	Rt01/03 Karangtejo Kedu	Evakuasi Sarang Tawon
23	19 Juni 2018	Paingan 02/04 Purworejo Tmg	Evakuasi Sarang Tawon
24	20 Juni 2018	Dusun dalem 02/01 Teguhanuh Kaloran	Evakuasi Sarang Tawon
25	21 Juni 2018	Mbangun Sari RT02/08 Badran Kranggan	Evakuasi Sarang Tawon
26	22 Juni 2018	Sebelah Timur SMP N 5	solar tumpah
27	22 Juni 2018	Jembatan sekrikil	solar tumpah
28	22 Juni 2018	Payungan Walitelon Utara	solar tumpah
29	01 Juli 2018	Sebelah Timur SMP N 5	solar tumpah
30	01 Juli 2018	Jetis 02/08 Gambasan Selopampang	Evakuasi Sarang Tawon
31	04 Juli 2018	Sekrecek Candiroto	pohon tumbang
32	04 Juli 2018	Jl Walitelon utara	Pohon Tumbang
33	04 Juli 2018	Tikungan Widoro	solar tumpah
34	16 Juli 2018	Cekelan Depan Kantor Samsat Temanggung	Evakuasi Sarang Tawon
35	03 Agustus 2018	Pertigaan RM Lukito	solar tumpah
36	08 Agustus 2018	Pakistan Walitelon	tumpahan semen
37	19 Agustus 2018	Jembatan sekrikil	solar tumpah
38	19 Agustus 2018	Sekrrikil Walitelon	solar tumpah
39	24 Agustus 2018	Tikungan Widoro	solar tumpah
40	25 Agustus 2018	Tikungan Papringan Walitelon Utara	solar tumpah
41	28 Agustus 2018	Sebelah Timur SMP N 5	solar tumpah
42	28 Agustus 2018	Lmpu merah Maron	solar tumpah
43	28 Agustus 2018	Jembatan sekrikil	solar tumpah
44	29 Agustus 2018	Jembatan Sekrikil	solar tumpah
45	12 September 2018	Tikungan Widoro	solar tumpah
46	15 September 2018	Madureso Temanggung	Evakuasi Sarang Tawon
47	22 September 2018	Jembatan Sekrikil	solar tumpah
48	25 September 2018	Seneng RT 14/04 Pateken Wonoboyo	Evakuasi Sarang Tawon
49	01 Oktober 2018	Tikungan Widoro	solar tumpah
50	03 Oktober 2018	TIKUNGAN Alun-Alun	solar tumpah
51	09 Oktober 2018	bedali soborejo pringsurat	Evakuasi Sarang Tawon
52	11 Oktober 2018	Diwek, Sunggingsari, Parakan	Evakuasi Sarang Tawon
53	13 Oktober 2018	Perum Korpri Badran Blo B Kec. Kranggan	Evakuasi Sarang Tawon
54	21 Oktober 2018	Ngadimulyo Kec Kedu	Evakuasi Korban Jatuh ke Sumur
55	26 Oktober 2018	Bebengan Rt02 Rw07 Gandurejo Bulu	Evakuasi Sarang Tawon
56	10 November 2018	Jalan Lingkar Maron	Evakuasi Pohon Tumbang
57	15 November 2018	Jetis Nglimbrang	Evakuasi Ular

58	16 November 2018	Mergosono RT10/RW 03 Semen Wonoboyo	Evakuasi Sarang Tawon
59	16 Desember 2018	Walitelon depan SMPN 5 TMG	Tumpahan Semen
60	28 Desember 2018	Dusun Demangan RT02 RW 03 Candimulyo Kedu	Evakuasi Sarang Tawon
61	30 Desember 2018	Dusun Santren Gelapansari	Evakuasi Pohon Tumbang
62	31 Desember 2018	Geneng Rt03/01 Kowangan	Evakuasi Sarang Tawon
Jumlah kasus non kebakaran yang ditangani			62 kasus

Dari tabel 2.20 penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Pemadam Kebakaran terdapat 62 kasus pada tahun 2018.

Tabel. 2.21
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung

No.	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2018 (%)	Status
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Indeks Rasa Aman	angka	n.a	n.a	n.a	n.a	0,63	n.a	n.a	n.a	n.a		n.a	n.a
2	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	91,02	95,24	94,24	87,3		87,3	TT
3	Rasio petugas Satpol PP	Angka	4,80	4,70	4,70	1,18	1,18	5,15	4,27	3,17	1,18		100	TT
4	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)	Rasio	1,60	1,60	1,62	1,62	1,62	1,59	1,66	1,60	1,48		91,38	AT
5	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	40	60	80	80	60,64	20,21	20,21	60,64	60,64		75,81	AT
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	73	80	80	80	69,8	42,22	45,24	66,00	69,8		75,70	AT

7	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	87	90	93	95	40	70,59	82,35	38,64	39,6		39,6	UK
---	---	---	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	------	--	------	----

Status capaian indikator kinerja daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja dengan status telah tercapai ada 3 (tiga) indikator, yaitu :

- 1) Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
 - Faktor pendorong : Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, kesadaran masyarakat
 - Faktor penghambat : Personil PPNS belum ada, jumlah personil kurang.

b. Indikator kinerja dengan status akan tercapai ada 3 (tiga) indikator, yaitu :

- 1) Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Faktor pendorong : Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, anggaran
 - Faktor penghambat : Anggaran kurang, terbatasnya personil, keterbatasan SDM.
- 2) Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)
 - Faktor pendorong : Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, anggaran
 - Faktor penghambat : Anggaran, personil terbatas
- 3) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
 - Faktor pendorong : Jarak terjangkau, Lalu lintas yang mendukung
 - Faktor penghambat : Kurangnya Pos Pemadam Kebakaraan, Personil dan Sarana potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Temanggung.
- 4) Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*)
 - Faktor pendorong : Informasi dari masyarakat/korban yang cepat, tepat, akurat, Tersediannya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran yang baik
 - Faktor penghambat : Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat untuk melapor bila mana terjadi

Kebakaran ke Pos Pemadam Kebakaran, Medan yang sulit berbukit-bukit dan kondisi jalan yang rusak, kondisi mobil Pemadam Kebakaran ada yang kurang handal untuk menempuh medan yang terjal.

- c. Indikator kinerja dengan status perlu upaya keras ada 1 (satu) indikator, yaitu :
- 1) Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi
 - Faktor pendorong : Peremajaan Mobil Pemadam Kebakaran dengan spesifikasi yang sesuai dengan kondisi topografi wilayah Kabupaten Temanggung
 - Faktor penghambat : Terbatasnya alokasi anggaran diklat teknis bagi Personil Pemadam Kebakaran, Kurangnya Personil Pemadam Kebakaran

2.2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam hal SDM Polisi Pamong Praja maupun Pemdak Kebakaran
- b. Belum adanya PPNS yang berada di Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung maupun belum adanya sekretariat PPNS
- c. Masih minimnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi
- d. Kurangnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

2.3. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja PD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel. 2.22

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA TIDAK LANGSUNG							
	Gaji dan Tunjangan					5.046.832.766		Gaji dan Tunjangan					2.838.419.116	
	Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung					5.046.832.766		Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung					2.838.419.116	
Sumber Dana : DAU							Sumber Dana : DAU							
BELANJA LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG							
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
A.	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum						A.	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum						
1	Penertiban Pedagang Kaki Lima	Temanggung	Terlaksananya penertiban pedagang kaki lima	7	Kecamatan	30.000.000	1	Penertiban Pedagang Kaki Lima	Temanggung	Terlaksananya penertiban pedagang kaki lima	7	Kecamatan	30.000.000	
2	Penegakan perda dan yustisi	Temanggung	Terlaksananya penegakan perda dan yustisi	12	bulan	25.000.000	2	Penegakan perda dan yustisi	Temanggung	Terlaksananya penegakan perda dan yustisi	12	bulan	25.000.000	
3	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Temanggung	1.Terbayarnya Gaji Tenaga Bantu Pol PP sejumlah 30 orang. 2.Terlaksananya patrol ketertiban umum dan ketentraman	12	bulan	725.000.000	3	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Temanggung	1.Terbayarnya Gaji Tenaga Bantu Pol PP sejumlah 30 orang. 2.Terlaksananya patrol ketertiban umum dan ketentraman	12	bulan	725.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			masyarakat (patrol pekat) dan patrol terpadu keamanan daerah							masyarakat (patrol pekat) dan patrol terpadu keamanan daerah				
8	Pengamanan dan Pengawasan	Temanggung	Terselenggaranya pengamanan dan pengawasan protokoler	20	Kecamatan	15.000.000	8	Pengamanan dan Pengawasan	Temanggung	Terselenggaranya pengamanan dan pengawasan protokoler	20	Kecamatan	15.000.000	
9	Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Temanggung	Terlaksananya pelaksanaan upacara kenegaraan yang khidmat	10	Kegiatan	70.000.000	9	Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Temanggung	Terlaksananya pelaksanaan upacara kenegaraan yang khidmat	10	Kegiatan	70.000.000	
10	Pembinaan Masyarakat	Temanggung	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat	20	Kecamatan	0	10	Pembinaan Masyarakat	Temanggung	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat	20	Kecamatan	0	
11	Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Temanggung	Terlaksananya pelaksanaan upacara kenegaraan yang khidmat	7	Pentas	80.000.000	11	Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Temanggung	Terlaksananya pelaksanaan upacara kenegaraan yang khidmat	7	Pentas	80.000.000	
B.	Program peningkatan perlindungan masyarakat						B.	Program peningkatan perlindungan masyarakat						
1	Pembinaan satuan linmas	Temanggung	Terbinanya Satlinmas di tiap desa/kelurahan dan terlaksananya diklat untuk anggota Linmas	289	desa/ kelurahan	125.000.000	1	Pembinaan satuan linmas	Temanggung	Terbinanya Satlinmas di tiap desa/kelurahan dan terlaksananya diklat untuk anggota Linmas	289	desa/ kelurahan	125.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Cipta kondisi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	Temanggung	Terlaksananya kondisi pemilu Legislatif dan Presiden yang kondusif	216	Desa	950.000.000	2	Cipta kondisi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden	Temanggung	Terlaksananya kondisi pemilu Legislatif dan Presiden yang kondusif	289	Desa/ Kelurahan	500.000.000	
C.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran						C.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran						
1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Temanggung	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, Kesiapan dalam penanggulangan bencana bahaya kebakaran	16	Unit mobil Damkar, selang dan sarpras yang lain	195.000.000	1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Temanggung	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, Kesiapan dalam penanggulangan bencana bahaya kebakaran	16	Unit mobil Damkar, selang dan sarpras yang lain	195.000.000	
2	Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran	Temanggung	1.Terbayarnya Gaji Satgas Damkar 40 orang 2.Sosialisasi kepada masyarakat, Mewujudkan masyarakat yang tanggap bahaya kebakaran	12 14	Bulan Kegiatan	935.000.000	2	Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran	Temanggung	1.Terbayarnya Gaji Satgas Damkar 40 orang 2.Sosialisasi kepada masyarakat, Mewujudkan masyarakat yang tanggap bahaya kebakaran	12 14	Bulan Kegiatan	935.000.000	
2	PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH						3	PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH						
A.	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah						A.	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah						
1	Penyusunan dan pelaporan	Temanggung	Terlaksananya penyusunan dan	27	Dokumen	5.000.000	1	Penyusunan dan pelaporan	Temanggung	Terlaksananya penyusunan dan	27	Dokumen	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	dokumen perencanaan		pelaporan dokumen OPD					dokumen perencanaan		pelaporan dokumen OPD				
B.	Program pelayanan administrasi perkantoran						B.	Program pelayanan administrasi perkantoran						
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Temanggung	Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik, internet	12	Bulan	50.000.000	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Temanggung	Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik, internet	12	Bulan	50.000.000	
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Temanggung	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	Bulan	62.000.000	2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Temanggung	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	Bulan	62.000.000	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Temanggung	Tersedianya alat tulis kantor	12	Bulan	5.000.000	3	Penyediaan alat tulis kantor	Temanggung	Tersedianya alat tulis kantor	12	Bulan	5.000.000	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	4.000.000	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	4.000.000	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Temanggung	Tersedianya komponen instalasi kantor	12	Bulan	7.000.000	5	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Temanggung	Tersedianya komponen instalasi kantor	12	Bulan	7.000.000	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	1.500.000	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	1.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
7	Penyediaan makanan dan minuman	Temanggung	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai	12	Bulan	45.000.000	7	Penyediaan makanan dan minuman	Temanggung	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai	12	Bulan	45.000.000	
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Temanggung	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	55.000.000	8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Temanggung	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	55.000.000	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Temanggung	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	3.000.000	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Temanggung	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	3.000.000	
10	Jasa pelayanan perkantoran	Temanggung	Tersedianya pembayaran uang lembur PNS dan belanja jasa transaksi keuangan	12	Bulan	10.000.000	10	Jasa pelayanan perkantoran	Temanggung	Tersedianya pembayaran uang lembur PNS dan belanja jasa transaksi keuangan	12	Bulan	10.000.000	
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Temanggung	Tersedianya penjaga malam	0	Bulan	80.000.000	11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Temanggung	Tersedianya penjaga malam	0	Bulan	80.000.000	
C.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						C.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Temanggung	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	2	Jenis Barang	5.000.000	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Temanggung	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	2	Jenis Barang	5.000.000	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Temanggung	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	4	Jenis Barang	10.000.000	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Temanggung	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	4	Jenis Barang	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Temanggung	Terlaksananya servis, pembelian suku cadang, pembelian BBM, pembayaran STNK	12	Bulan	125.000.000	3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Temanggung	Terlaksananya servis, pembelian suku cadang, pembelian BBM, pembayaran STNK	12	Bulan	125.000.000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Temanggung	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	5.000.000	4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Temanggung	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	5.000.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Temanggung	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	Bulan	5.000.000	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Temanggung	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	Bulan	5.000.000	
6	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Temanggung	Terpeliharanya gedung kantor	1	Unit gedung	40.000.000	6	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Temanggung	Terpeliharanya gedung kantor	1	Unit gedung	40.000.000	
D.	Program peningkatan disiplin aparaturnya						D.	Program peningkatan disiplin aparaturnya						
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Temanggung	Meningkatnya kinerja aparaturnya	90	stel	56.500.000	1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Temanggung	Meningkatnya kinerja aparaturnya	90	stel	56.500.000	1.
2.	Pembinaan dan pengembangan Satpol PP	Temanggung	1.Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP 2.Terlaksananya pengiriman peserta Gelar Pasukan dan Corps Building Satpol PP	127	Orang	50.000.000	2.	Pembinaan dan pengembangan Satpol PP	Temanggung	1.Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP 2.Terlaksananya pengiriman peserta Gelar Pasukan dan Corps Building Satpol PP	127	orang	50.000.000	2.

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
Sumber Dana : DBHCHT							Sumber Dana : DBHCHT							
Belanja Langsung							Belanja Langsung							
PERDAGANGAN							KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
A.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan						Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum							
1.	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Temanggung	Terlaksananya pemberantasan barang kena cukai ilegal	20	Kecamatan	125.000.000	1.	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Temanggung	Terlaksananya pemberantasan barang kena cukai ilegal	20	Kecamatan	125.000.000	

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal;
2. Terdapat penggabungan beberapa kegiatan (kegiatan Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Kegiatan Koordinasi Keamanan Daerah digabung dalam kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.23

Usulan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung yang melaksanakan urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan urusan tersebut, maka Satpol PP dan Pemadam Kebakaran perlu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasukkan indikator yang termuat dalam Standar Pelayanan Minimal sesuai yang diatur dalam Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota. Sesuai dengan ketentuan tersebut, yang menjadi tanggung Satpol PP dan Pemadam kebakaran kabupaten Temanggung meliputi 2 (dua) jenis pelayanan dasar, yaitu: pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran. Secara rinci, untuk kedua jenis pelayanan dasara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup 3 (tiga) indikator pelayanan, yaitu :

a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang

dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain: tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, dan tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

c. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota

Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu

memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

2. Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom.

Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM penanggulangan kebakaran meliputi:

a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam

kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran.

Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*).

Daerah yang sudah membentuk WMK maka satuan tugas pemadam kebakaran harus melakukan inspeksi secara berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran dan menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, sarana dan prasarana pada tanggap darurat antara lain mobil pemadam kebakaran, pompa air pemadam api yang dapat digunakan dimana saja, pos pelayanan pemadam kebakaran ditengah WMK.

- b. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

- c. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

- d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah

yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2020.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2020, maka tujuan dari urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Adapun sasaran dari urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum ;
2. Meningkatnya perlindungan masyarakat ;
3. Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Satpol PP dan Damkar Kab. Temanggung pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Temanggung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2020	TARGET KONDISI AKHIR 2018
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya ketentraman, dan ketertiban umum.	Indeks Rasa Aman	angka	0,63	n.a
		Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	%	100	100
		Rasio Petugas Satpol PP	rasio	1,18	1,18
	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Rasio Linmas per RT	rasio	1,48	1,62
	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	65	70
		Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	40	80

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.

Adapun Program dan Kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2020 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2020. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2020 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 97,38 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 92,92 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2020 Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.270.832.766,00 terdiri dari alokasi untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 5.046.832.766,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.

4.224.000.000,00 dengan jumlah program 7 (tujuh) program, antara lain program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, program peningkatan perlindungan masyarakat, program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur serta indikator kinerja program sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja program.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19611110 198503 1 018